

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI
BUKIT BUAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

OLEH

FIQIH ADRIANS

2210112159

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(PK VII)**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

LEMBARAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET
No. Reg: 30/PK-VII/IV/2026

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
DI BUKIT BUAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

*THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE DISTRIBUTION
OF SOCIAL ASSISTANCE IN BUKIT BUAI TAPAN, PESISIR SELATAN
REGENCY*

Disusun Oleh
Author

Figih Adrians
NIM: 2210112159

Program Kekhususan (PK): Hukum Administrasi Negara (PK VII)
Concentration Program (CP): Administration Law (CP VII)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27
Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:
*The Minor Thesis Was Defended in the Comprehensive Examination Session on August
27th 2026 and Approved by a Team of Examiners Consisting of:*

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I

Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP. 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I

Darnis, S.H., M.H.
NIP. 196202151989012001

Pembimbing II
Supervisor II

Hendria Fithrina S.H., M.H.
NIP. 196812281999032001

Penguji I
Examiner I

Gusminarti, S.H., M.H.
NIP. 196208081988112002

Penguji II
Examiner II

Amelia Zulfitri, S.H., M.H.
NIP. 199006292024062002

	No. Alumni Universitas	Fiqih Adrians	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Painan, 4 Desember 2005	f. Tanggal Lulus : 27 Agustus 2026	
	b. Nama Orangtua : Syofyan R, Marianis	g. Predikat Lulus : Dengan Pujian	
	c. Fakultas : Hukum	h. Lama Studi : 4 Tahun	
	d. PK : Hukum Administrasi Negara	i. IPK : 3,24	
	e. No. BP : 2210112159	j. Alamat : Padang Marapalam	

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI BUKIT BUAJ TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Fiqih Adrians, 2210112159, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 92 Halaman + ix, Tahun 2026, Pembimbing Darnis, S.H., M.H. dan Hendria Fithrina S.H., M.H.

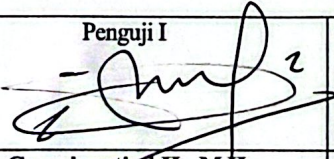
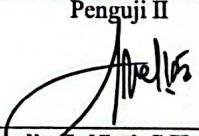
ABSTRAK

Kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk pelayanan guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan pemerintah adalah bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat undang undang dasar negara republik Indonesia dalam Alinea ke-4 yang mengharuskan negara untuk dapat menjamin perlindungan bagi setiap warga negara dalam hal kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaannya bantuan sosial diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko sosial. Setiap wilayah negara Indonesia termasuk Nagari Bukit Buai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat nya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui berbagai macam tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Pertama bagaimana peran pemerintah nagari bukit buai tapan dalam penyaluran bantuan sosial di Bukit Buai Tapan? Kedua, bagaimana tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Bukit Buai Tapan? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan memiliki peran yang strategis dalam distribusi bantuan sosial, mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi, koordinasi, fasilitasi penyaluran, hingga pengawasan. Meskipun pelaksanaan distribusi bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala administratif, komunikasi, dan keterbatasan anggaran, upaya yang dilakukan melalui penguatan koordinasi, transparansi, serta pendampingan kepada masyarakat mampu meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi potensi konflik sosial, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan bantuan sosial di tingkat Nagari.

Kata Kunci: Pemerintah Nagari, Bantuan Sosial, DTSEN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang FIQIH ADRIANS	Gusminarti, S.H., M.H.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: